

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil *et al.*, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Penada Media Group*, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budimansyah, Dasim, 2008, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, PT Genesindo, Bandung.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, St. Paul Minn West Publishing, United Stated of America.
- Hananta, Dwi, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hatta, Mohammad, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mackay R.E., 2000, *Ethics and Good Practice in Restorative Justice*, Leuven University Press, Leuven.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Muchtar, Masrudi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono *et al.*, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surahman, RM., 1996, *Mozaik Hukum I: Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Suteki *et al.*, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), *UN Economic and Social Council Resolution 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, 24 July 2002, E/RES/2002/12.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Pidato

Soedarto, “Suatu Dilema Dalam Sistem Pidana Indonesia”, *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
93).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4026).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4429).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 19).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di
Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
SE/8/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan
Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

D. Tesis dan Disertasi

- Beja, 2015, “Kedudukan Penyidik dalam Penerapan Program Restorative Justice Perkara Pidana Umum di Polres Bantul”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Studi Magister Hukum Litigasi, Yogyakarta.
- Bonic, Ronni, 2015, “Peran Polri Dalam Mengimplementasikan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara (Studi Di Kepolisian Resort Binjai)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Dormian, 2015, “Implementasi *Restorative Justice* Melalui Pidana Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Sebagai Syarat Khusus Dalam Putusan Pidana Bersyarat”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugraha, Gamal Prasetya, 2018, “Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana Hukum Litigasi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wardana, Hendra Kusuma, 2018, “Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Zunaidi, Ahmad Hajar, 2012, “Perluasan Penerapan Pasal 82 KUHP Tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Proses Persidangan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Jakarta.

E. Jurnal

- Candra, Septa, “*Restorative Justice* : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013.
- Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.
- Prayitno, Kwat Puji, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In

Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.

F. Internet

Arief, Barda Nawawi, "Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan", <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, diakses pada 19 Februari 2020.

Azhari, Daud, "Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Pulau Lombok", <http://marketermataram.blogspot.com/2013/10/masyarakat-hukum-adat-suku-sasak-di.html>, diakses pada 20 Februari 2020.

Babel01, "Rapat Koordinasi *Criminal Justice System* di Belitung Timur", <https://kejati-babel.go.id/rapat-koordinasi-kriminal-criminal-justice-system-di-belitung-timur/>, diakses pada 16 September 2019.

Boonsit, Angkana, "Restorative Justice For Adults And Juveniles In Thailand", <file:///D:/UGM/tesis/Electronic%20Jurnal/subbab%20A%20no%202/rj%20in%20thailand..pdf>, diakses pada 13 Maret 2020

Burhanuddin, "Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia", <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=255&hal=1>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Komisi Kepolisian Nasional Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, "Penegakan Hukum Berorientasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", https://kopolnas.go.id/wp-content/uploads/Penegakan-Hukum-Berorientasi-Nilai-Nilai_Pancasila_Pendekatan-Keadilan-Restoratif_2016.pdf, diakses pada 26 Februari 2020.

Mimin, Imanuel H., "Bakar Batu Dan Nilai-Nilainya Dalam Kehidupan Masyarakat Papua" <https://www.kompasiana.com/manumimin/5df21d18d541df03d53b67a2/makalah-tradisi-bakarbatu-nilai-nilainya-dalam-kehidupan-masyarakat-adat-di-wilayah-pegunungan-tengah-papua?page=all>, diakses pada 20 Februari 2020.

Nov, "Kasus Kecil Diharapkan Tidak Sampai Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2f6e043cf4d/kasus-kecil-diharapkan-tidak-sampai-pengadilan> diakses pada 17 April 2019.

Pd, "Gelar Doktor Untuk Kapuspenkum Amir Yanto Dengan Predikat Sangat Memuaskan", <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=10807&hal=149>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.

- Rahadi, Fernan, “Musyawarah Mufakat Kelebihan Indonesia Dalam Demokrasi” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/09/p6wrcx291musyawarah-mufakat-kelebihan-indonesia-dalam-demokrasi>, diakses pada 21 Februari 2020.
- Redaksi, “Indahnya Hukum Qishash”, <https://asysyariah.com/indahnyahukum-qishash/>, diakses pada 11 Maret 2020.
- Ridlo, Muhamad, “Belajar Dari Kasus Nenek Minah Pencuri Kakao”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3203697/belajar-dari-kasus-nenek-minah-pencuri-kakao>, diakses pada 17 April 2019.
- S. Latha dan R. Thilagaraj, “Restorative Justice in India”, <https://link.springer.com.ezproxy.ugm.ac.id/article/10.1007/s11417-013-9164-4>, diakses pada 19 Oktober 2019.
- Suyatra, I Putu, “Perda Desa Adat Perkuat Posisi Adat, Warga, dan Budaya Bali”, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/10/07/159531/perda-desadadat-perkuat-posisi-adat-warga-dan-budaya-bali>, diakses pada 21 Februari 2020.
- The Economic and Social Council*, “Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)”, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>, diakses pada 11 September 2019.
- United Nations Office of Drugs and Crime*, “Handbook on Restorative Justice Programmes”, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/handbook-on-restorative-justice-programmes/>, diakses pada 11 September 2019.
- Yossawan Boriboonthana dan Sangduen Sangbuangamlum, “Effectiveness of the Restorative Justice Process on Crime Victims and Adult Offenders in Thailand”, <https://link.springer.com.ezproxy.ugm.ac.id/content/pdf/10.1007/s11417-013-9160-8.pdf>, diakses pada 13 Maret 2020.